

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan

Indonesia. *Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke 4*

_____. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1)*

_____. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).*

_____. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1).*

_____. *Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri, UU No. 37 Tahun 1999, Pasal 1 angka 1. Penjelasan Umum, LN Nomor 156 Tahun 1999.*

_____. *Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri, UU No. 37 Tahun 1999, Pasal 1 ayat (3), Penjelasan Umum, LN Nomor 156 Tahun 1999.*

_____. *Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional, UU No. 24 Tahun 2000, Pasal 1 angka 1, Penjelasan Umum, LN Nomor 185 Tahun 2000.*

_____. *Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2002, Pasal 1 angka 1, Penjelasan Umum, LN Nomor 109 Tahun 2002.*

- _____. *Undang-Undang tentang Penataan Ruang, UU No. 26 Tahun 2007, Pasal 1. Penjelasan Umum, LN Nomor 68 Tahun 2007*
- _____. *Undang-Undang tentang Pengesahan Asean Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women and Children (Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak), UU No. 12 Tahun 2017, Penjelasan Umum, LN Nomor 230 Tahun 2017.*
- _____. *Undang-Undang tentang Pengesahan Asean Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women and Children (Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak), UU No. 12 Tahun 2017, Pasal 11 Lampiran, LN Nomor 230 Tahun 2017.*
- _____. *Undang-Undang tentang Pengesahan Asean Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women and Children (Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak), UU No. 12 Tahun 2017, Pasal 12 Lampiran, LN Nomor 230 Tahun 2017.*
- _____. *Undang-Undang tentang Pengesahan Asean Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women and Children (Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak), UU No. 12 Tahun 2017, Pasal 13 Lampiran, LN Nomor 230 Tahun 2017.*
- _____. *Undang-Undang tentang Pengesahan Asean Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women and Children (Konvensi*

Asean Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak), UU No. 12 Tahun 2017, Pasal 14 Lampiran, LN Nomor 230 Tahun 2017.

_____. *Undang-Undang tentang Pengesahan Asean Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women and Children (Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak)*, UU No. 12 Tahun 2017, Pasal 16 Lampiran, LN Nomor 230 Tahun 2017.

Konvensi

Treaty of Versailles, 1919, Article 297 dan 304.

Universal Declaration of Human Rights (UDHR), 1948, Pasal 2.

Vienna Convention 1969 on the Law of Treaties, Pasal 2.

Protokol untuk Pencegahan, Penekanan dan Penghukuman Perdagangan

Manusia Khususnya Perempuan dan Anak, Tahun 2000 Pasal 3 Huruf a

Buku

Agussalim Andi Gadjong, *Ilmu Negara*, Makassar: KretekBABupa 2019.

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru: Bandung 1983.

Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan; Lex Specialis Suatu Masalah*, Surabaya; JP Books 2006.

Diantha I M P Dkk, *Buku Ajar, Hukum Internasional* Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, 2017.

Starke JG *Pengantar Hukum Internasional* edisi kesepuluh Jakarta : Sinar Grafika, 2011.

Mochtar Kusuma'atmadja, *Pengantar Hukum Internasional Buku 1 Bagian Umum* Bandung : Alumni, 1981.

Chairijah dan Sobar Sukmana *Materi Perkuliahan Hukum Perjanjian Internasional* Bogor: Fakultas Hukum Universitas Pakuan, 2018.

Hull, Terrence et al, *Pelacuran di Indonesia, sejarah dan perkembangannya*. Jakarta: Pistaka Sinar Harapan bekerjasama dengan Ford Foundation, 1997.

Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, "*penghapusan Perdagangan Orang (Trafficking in Persons) di Indonesia*". Jakarta; tanpa penerbit, 2004.

Lain-Lain

<https://kbbi.web.id/negara.html> Diakses pada 1 mei 2020 pukul 08.30

Yugi A. "*Unsur-Unsur Terbentuknya Negara*" Tersedia di <https://cerdika.com/unsur-unsur-terbentuknya-negara/>. Diakses pada 16 Mei 2020. Pukul 05.09 WIB.

Kementerian Luar Negeri RI. "*kejahatan Lintas Negara*". Tersedia di www.kemenlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara, diakses 26 Februari 2020.

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli>.
Diakses 22 mei 2020.

Kementerian Pemberdayaan PPA. "*Press Release Perlindungan Kaum Perempuan Wujudkan Indonesia Hebat*". Tersedia di <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1390/perlindungan-kaum-perempuan-wujudkan-indonesia-hebat>. Diakses 12 Maret 2020.

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Indonesia. Diakses 19 mei 2020

Kbbi.web.id/selundup.html. Diakses 22 mei 2020

Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia, "*Indonesia Ratifikasi RUU tentang Pengesahan ACTIP, Especially Women and Children*". Tersedia di <http://setnas-asean.id/siaran-pers/read/indonesia-ratifikasi-ruu-tentang-pengesahan-actip-especially-women-and-children>, Diakses 12 Maret 2020.

Pawiroputro.E "*Hukum Internasional Umum*" Modul 1. hlm 6, tersedia di <http://repository.ut.ac.id/3887/1/PKNI4310-M1.pdf>. Diakses 16 Juni 2020, Pukul 14.24.

<https://www.negarahukum.com/hukum/bentuk-atau-perwujudan-dari-hukum-internasional.html>. Diakses 16 Juni 2020. Pukul 14.30.

Contoh perjanjian internasional tersedia di <https://ppkn.co.id/contoh-perjanjian-internasional/>. Diakses 13 July 2020. Pukul 15.37.

Sekretariat nasional asean-Indonesia, "tentang ASEAN" Tersedia di <http://setnas-asean.id/tentang-asean>. Diakses, 2 Juli 2020 pukul 22.12.

Sekretariat nasional ASEAN-Indonesia "tujuan ASEAN, lengkap dengan sejarah berdirinya dan pembentukan sejarah ASEAN" Tersedia di <http://setnas-asean.id/news/read/tujuan-asean-lengkap-dengan-sejarah-berdirinya-dan-pembentukan-komunitas-asean>. Diakses jumat 3 Juli 2020 pukul 23.00.

Kemlu "tentang ASEAN" tersedia di https://kemlu.go.id/portal/id/read/122/halaman_list_lainnya/tentang-asean. Diakses 4 Juli pukul 10.50.

Muliyawan. "Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak Pasca Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak". Tersedia di <http://pn-palopo.go.id/>. Diakses 9 Juli 2020. Pukul 14.05 WIB.

Rini Fitriani. Jurnal Hukum "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak". Tersedia di <https://media.neliti.com/media/publications/240378-peranan-penyelenggara-perlindungan-anak-ff389e41.pdf>. Diakses pada Kamis 9 Juli 2020. Pukul 14.27 WIB.

Kementerian luar negeri Republik Indonesia "isu khusus kejahatan lintas negara" tersedia di

https://kemu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara. Diakses 14 Juli 2020. Pukul 18.36.

Daniah dan Apriani "National Anti-Trafficking Policies in International Migration" Hlm 149-150. Tersedia di <https://jurnal.dpr.go.id>. Diakses 14 July 2020 Pukul 22.33.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia tersedia di <https://www.kpai.go.id/profil>. Diakses pada 15 Juli 2020, Pukul 18.39

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan tersedia di https://id.m.wikipedia.org/wiki/komisi_Nasional_Anti_Kekerasan_terhadap_Perempuan. Diakses 15 Juli 2020. Pukul 19.32.

Dp3akb jabar "fungsi dan tujuan komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan" tersedia di <http://dp3akb.jabarprov.go.id/fungsi-dan-tujuan-komisi-nasional-anti-kekerasan-terhadap-perempuan/>. Diakses 15 Juli 2020. Pukul 20.55

Situmorang.M dkk, "penelitian tentang koordinasi antar lembaga dan dalam pemberantasan perdagangan anak" hlm 66. Tersedia di bphn.go.id. Diakses 15 juli 2020. Pukul 23.42.

Sekretariat gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang "pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang" Hlm 84. Tersedia di <https://kemenpppa.go.id>. Diakses 16 juli 2020. Pukul 00.43.

Hukum online "Perlindungan Hukum Pekerja Migran Masih Perlu Perbaikan" tersediadi <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d6469847a662/perlindungan>

n-hukum-pekerja-migran-masih-perlu-perbaikan/
oktober 2020 pukul 12.33

Diakses pada 26